

Site To Download Tunjangan Pns Remunerasi Pns Tunjangan Kinerja Dan

If you ally infatuation such a referred **Tunjangan Pns Remunerasi Pns Tunjangan Kinerja Dan** books that will give you worth, get the unquestionably best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are afterward launched, from best seller to one of the most current released.

You may not be perplexed to enjoy every books collections Tunjangan Pns Remunerasi Pns Tunjangan Kinerja Dan that we will definitely offer. It is not concerning the costs. Its nearly what you infatuation currently. This Tunjangan Pns Remunerasi Pns Tunjangan Kinerja Dan, as one of the most lively sellers here will utterly be in the middle of the best options to review.

26E - BEST KOBE

"" Saya salut sekali, kepada adik saya, Muhammad Ramli, atas usaha dan kerja kerasnya dalam memotivasi dan membimbing anak-anak saya selama mengikuti bimbingan di Adzkia, sehingga 3 orang anak saya berhasil lulus ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Terus berbuat dan berkarya, semoga Tuhan memberkati. -- Bungawati Hutagalung SE., MM Kepala Sub Bagian Humas dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Utara
Terima kasih atas bimbingan, motivasi dan arahan Pak Ramli kepada anak saya, Dio Septian Hasibuan, alumni SMA Harapan Medan selama belajar di Adzkia, sehingga berhasil lulus masuk sekolah kedinasan IPDN Kemendagri 2013. Semoga bapak dapat terus membimbing putra putri terbaik lainnya menuju cita-cita mereka. -- Drs. Hanas Hasibuan MAP Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Medan
Motivasi Pak Ramli bagaikan bom nuklir bagi hidup saya. Motivasinya membuat saya meledak dan terpacu untuk belajar keras dan pantang menyerah sehingga saya berhasil lulus ke STAN, D3 Sekolah Kedinasan PLN dan USU. Soal-soal yang ada di buku ini sangat membantu saya mempersiapkan diri masuk STAN, karena pembahasannya sangat lengkap dan akurat. Terima kasih banyak atas bimbingan bapak dan Adzkia selama ini. -- Muhammad Makhrojil Nasution Siswa Adzkia yang berhasil Lulus ke STAN, D3 PLN dan USU""

On corrupt practices in Indonesia; collection of articles.

A member of the AWL OD Series! Pay and Organizational Development examines the important role that reward systems play in organization development efforts. It combines examples and specific recommendations with conceptual material. It helps to organize various topics and put them into a total systems perspective. Specific pay approaches such as gain sharing, skill-based pay, and flexible benefits are discussed and their impact on productivity and the quality of work life are analyzed.

"Hanya bangsa yang inovatif, adaptif, dan produktiflah yang mampu menjaga kelangsungan hidupnya dan berjaya di muka bumi ini. Itulah yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato hari Kemerdekaan RI yang ke-64. Dan pesan itu terasa sangat pas di tengah lautan keprihatinan yang mengepung dan mengombang-ambingkan bangsa Indonesia. Buku ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi para anak bangsa terhadap kemajuan bangsa Indonesia. reka telah mengabdikan diri untuk melakukan riset dalam berbagai bidang kehidupan dan ingin membagikan apa yang telah mereka gagas dan temukan dengan harapan semua ini bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik."

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan bentuk baru pada pengelolaan keuangan publik di negeri ini. Istilah BLU mulai dikenal sejak tahun 2005 dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tata kelola BLU pada dasarnya adalah pemberian fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kumpulan Catatan, Pengaturan-Pengaturan, Serta Pelaksanaan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Sebagai seorang perintis kajian kependudukan, peran dan sumbangan Dr. Yulfitra Raharjo tidak perlu dipertanyakan lagi. Berbagai pemikiran dan kerja kerasnya dalam pengembangan kajian tentang isu-isu kependudukan dan pembangunan di Indonesia masih sangat relevan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para peneliti Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) LIPI, baik yang masih aktif maupun sudah purnatugas, dalam menafsirkan pemikiran-pemikiran Dr. Yulfitra Raharjo. Buku yang berbentuk bunga rampai ini terbagi menjadi berbagai topik yang terkait dengan kajian-kajian kependudukan dan pembangunan di Indonesia, yakni migrasi, kesehatan, lingkungan, pengembangan manusia, gender, dan perkembangan kelembagaan kependudukan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Dr. Yulfitra Raharjo masih sangat relevan dengan isu kependudukan dan pembangunan Indonesia saat ini, di antaranya terkait dengan penguatan studi yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan kajian pada isu-isu kependudukan. Penggunaan studi kualitatif perlu mendapat tempat untuk menghasilkan data kualitatif yang akurat dalam memahami proses-proses perubahan dan dinamika sebuah masyarakat. Selain itu, perspektif gender untuk menganalisis isu-isu kependudukan yang merupakan salah satu kompetensi Dr. Yulfitra Raharjo telah dirujuk oleh berbagai pihak, terutama untuk pengembangan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender. Buku ini cocok dibaca oleh akademisi, pemangku kepentingan, dan pemerhati isu-isu kependudukan dan pembangunan di Indonesia. Beberapa kertas kerja yang pernah dibuat oleh Dr. Yulfitra Raharjo masih relevan untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang diamanatkan dalam Permendagri 17 Tahun 2016 diarahkan untuk mendukung ekonomi lokal, memastikan semangat masyarakat yang berkelanjutan dan menunjukkan stabilitas yang diperlukan di mana kekuatan dan keseimbangan berdasarkan keterkaitan stakeholder termasuk dalam konsteks kependudukan. Tujuan buku ini adalah Identifikasi kebijakan Regional, Kelitbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, Merumuskan kegiatan kelitbangan dengan memperhatikan kebutuhan, skala prioritas, pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya, serta bersifat lintas sektoral yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah terhadap kependudukan ; dan Memperkuat kelembagaan dan tata kelola kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar lebih terstruktur, terarah dan bersinergi antar pemangku kepentingan. Hasil kajian ini disajikan dengan kerangka sistematis yang runut diawali den-

gan Bab I berupa Pendahuluan dan secara bertahap dibahas tentang Tinjauan Dasar Hukum dan Tinjauan Peningkatan dan Penguatan Organisasi Litbang sampai dengan Bab Lima memberikan deskripsi lebih lengkap tentang Arah Kebijakan Kelitbangan, Strategi Penguatan Peran Strategis Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan, Fokus Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Usulan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Tahun 2020-2024. Pada penutup kajian ini disampaikan dalam bentuk kesimpulan yang merangkum keseluruhan substansi secara singkat.

Berdasarkan UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 49 Ayat (2) bahwa tarif ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Lalu pada peraturan turunannya yaitu Permenkes Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (2) diatur bahwasanya tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost). Tarif merupakan penjumlahan antara Biaya Sarana atau Jasa Sarana (Istilahnya mungkin kurang tepat kalau disebut JASA) yang dihitung berdasarkan Biaya Satuan dan ditambah Jasa Pelayanan. Sehingga Jasa Pelayanan adalah salah satu komponen tarif sementara prinsip biaya satuan adalah menghitung setiap biaya per jenis layanan atau sering disebut Fee For Services (FFS). Sehingga tarif yang dihasilkan dari perhitungan biaya satuan adalah Tarif Fee For Services. Salah satu prinsip pembagian jasa pelayanan adalah No Work No Pay yang bermakna bahwa pembagian jasa pelayanan harus secara Fee For Services. Sehingga kesimpulannya adalah antara tarif biaya satuan dengan jasa pelayanan sama-sama bersifat Fee For Services yang berarti sejalan sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. Karena untuk membagi jasa pelayanan yang berdasarkan tarif biaya satuan tetap menggunakan kaidah Fee For Services. Buku Model Pembagian Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Dengan Metode Konversi Dan Proporsi ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah persoalan yang sangat krusial di Indonesia sebab memiliki kecenderungan untuk meningkat setiap tahunnya. Tidak mudah mencari solusi untuk persoalan AKI/AKB, sebab AKI/AKB melibatkan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, ketersediaan layanan kesehatan dasar dan aksesnya, implementasi dan reaksi atas kebijakan di tingkat lokal, pelibatan komunitas, posisi suami dan keluarga ibu hamil, serta keikutsertaan NGO dan CSO dalam proses pemantauan kebijakan menurunkan AKI/AKB di Indonesia. Berbagai persoalan di atas menjadi titik berangkat ketika kita bicara mengenai pelibatan komunitas dalam menurunkan AKI/AKB di Indonesia, dan untuk menjawab hal itulah Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Program Studi Kajian Gender UI dan Pusat Riset Gender Pascasarjana UI mengadakan PKWG Seminar Series #1 dengan topik "KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PELIBATAN KOMUNITAS DALAM MENURUNKAN AKI/AKB DI INDONESIA" pada 11-12 Juni 2015 di Program Pascasarjana Multidisiplin, Kampus UI Salemba, Jakarta. Buku yang anda pegang ini adalah prosiding dari PKWG Seminar Series #1 yang berisikan makalah dan diskusi. Seluruh tulisan dalam prosiding ini memiliki lokus dan fokus yang berbeda namun seluruhnya memiliki satu benang merah: untuk menurunkan AKI/AKB diperlukan pelibatan banyak pihak.

Pembangunan birokrasi yang reformis menjadi isu utama dan tujuan penyusunan buku ini. Kegelisahan yang muncul akibat banyaknya penyimpangan yang terjadi di pemerintahan membuat penulis merasa terpanggil hati nuraninya untuk berpikir dan menganalisa situasi kondisi yang ada dan melahirkan solusi dan pemecahan masalah menuju perbaikan berkelanjutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi justru ikut menjadi sumber masalah. Ketika regulasi diterapkan melahirkan tambahan masalah.

Masalah ini dibedah secara praktis dan empiris sehingga solusi yang ditawarkan pun sangat praktis dan empiris juga. Buku ini akan menjadi panduan praktis bagi para birokrat yang berkecimpung di pemerintahan pusat, daerah dan desa. Sifat praktis dan aplikatif menjadi unsur utama dalam materi buku ini. Oleh karena itu penerapannya bisa dilakukan oleh birokrasi di semua tingkatan.

Beberapa hal yang di bahas dalam buku ini secara sistematis adalah sebagai berikut: Bagian 1, membahas tentang Selayang Pandang Manajemen, Bagian 2, membahas tentang Perencanaan Sumberdaya Manusia. Bagian 3, membahas tentang Pengembangan Organisasi dan Manajemen Perubahan Bagian 4, membahas tentang, Rekrutmen dan Seleksi Bagian 5, membahas tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia. Bagian 6, membahas tentang Perencanaan dan Pengembangan. Karier Bagian 7, membahas tentang Remunerasi dan Kompensasi. Bagian 8, membahas tentang Penilaian Kinerja. Bagian 9, membahas tentang Hubungan Industrial. Bagian 10 membahas tentang Sistem Informasi SDM dan, Bagian 11 membahas tentang Sumberdaya Manusia Kompeten dan Profesional.

Bagaimana Membangun Kekayaan Pegawai Indonesia Tanpa Harus Korupsi! Bosan menjadi pegawai tetapi tidak memiliki cara dan pilihan lain? Atau ingin menjadi pegawai tetapi bisa KAYA RAYA dengan HALAL! Catat dan ingat, KAYA RAYA dengan HALAL! Jadi bukan seperti mereka yang menjabat, tetapi perilakunya seperti penjahat. Ya, penjahat meski dilakukan dengan cara yang tidak tampak. Sementara Anda ingin menjadi pegawai yang tetap bermartabat karena tidak pernah menjadikan status pegawai sebagai "berhala"? Atau ingin berpindah kuadran dari pegawai menjadi pebisnis dan investor tetapi masih takut-takut? Membaca buku ini adalah pilihan tepat. Di halaman-halaman depan, saya akan mengemukakan alasan-alasan praktisnya.

Economic and political failures of Indonesia's New Order government.

This book considers specific and practical ways in which NGO's can contribute to enabling people to build on the capacities they already possess. It reviews the types of social organisation with which NGO's might consider working and the provision of training in a variety of relevant skills and activities.

Buku ini terdiri atas lima bagian. Bagian 1 membahas sistem dan pembiayaan kesehatan, Bagian 2 membahas supply side dalam sistem kesehatan. Pembahasan pada bagian Bagian 1 dan 2 mempunyai dasar kerja sebagai suatu sistem yang akan terpengaruh oleh kebijakan di salah satu komponennya. Dalam hal ini, kebijakan JKN yang merupakan kebijakan komponen pembiayaan, akan memengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem kesehatan secara keseluruhan, termasuk supply side. Interaksi antara komponen pembiayaan dan komponen pelayanan dalam sistem kesehatan merupakan sebuah hal yang dinamis. Perubahan dinamis ini dibahas dalam Bagian 3 tentang pemantauan kebijakan JKN selama tahun 2014-2015. Selanjutnya, Bagian 4 membahas tantangan-tantangan pelaksanaan kebijakan JKN, sedangkan Bagian 5 membahas masa lalu dan masa depan kebijakan JKN. Pada penutup buku ini, para pembaca diharapkan melakukan refleksi untuk mengingat kembali perlunya konsep sistem dalam perbaikan kebijakan JKN pada masa mendatang. Buku ini menafsirkan rangkaian pengalaman selama empat tahun pelaksanaan kebijakan JKN sebagai sebuah fenomena fragmentasi yang tidak sengaja terjadi dalam sistem kesehatan. Kebijakan JKN melalui undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS banyak membahas komponen pembiayaan dalam sistem jaminan sosial, tetapi terpisah dari berbagai kebijakan lainnya dalam sistem kesehatan. Dua sistem yang fragmented ini, yaitu sistem jaminan sosial dan sistem pelayanan kesehatan, perlu dijembatani, sehingga menjadi satu sis-

tem kesehatan yang terpadu. Diharapkan buku ini dapat menjadi masukan untuk evaluasi kebijakan JKN di masa mendatang.

Universitas adalah kekuatan moral, tempat produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Universitas adalah "rumah", bagi para ilmuwan untuk mempertimbangkan masa depan umat manusia, yang akan sangat bergantung pada perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmuwan membutuhkan kebebasan akademik untuk dapat berkarya dan berinovasi, agar dapat luasnya seluas-luasnya menyumbangkan dirinya kepada kemajuan ilmu, berkontribusi kepada kemanusiaan, sekaligus menegakkan martabat bangsa dalam pergaulan masyarakat dunia. Kebebasan akademik hanya didapatkan dalam perguruan tinggi yang memiliki otonomi, karena makna otonomi bagi perguruan tinggi bersifat kodrati, menjadi roh bagi ilmuwan dalam menghasilkan puncak-puncak karyanya. Di Negara-negara lain, tampak bahwa perguruan tinggi yang memiliki otonomi menghasilkan karya-karya akademik berupa penelitian, publikasi yang berkualitas, inovasi yang hebat dalam berbagai bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara sangat mendukung sepenuhnya pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi. Namun Negara sama sekali tidak mencampuri urusan perguruan tinggi, dalam bidang akademik maupun non akademik. Fungsi Negara yang terutama ialah steering, melakukan pengawasan dan meregulasi, untuk memastikan bahwa perguruan tinggi bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan bukan mengintervensi. Otonomi mensyaratkan tata kelola, keduanya bagaikan dua sisi dari keping uang yang sama. Di dalam tata kelola perguruan tinggi disyaratkan akuntabilitas, transparansi, check and balance. Publik harus dapat mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi, antara lain melalui organ universitas tertinggi (The Trustee Body), dan dapat mengirim wakilnya dalam organ tersebut. Apabila semua persyaratan tata kelola itu tidak terjadi, maka berarti otonomi telah disalahgunakan. Di Indonesia, para ilmuwan masih berada dalam tahap memperjuangkan otonomi. Negara, cq pemerintah, bahkan terkesan membatasi para ilmuwan dengan menarik perguruan tinggi menjadi bagian dari birokrasi pemerintah, melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Padahal, menurut pendiri bangsa kita (Mr. Soepomo), hal itu justru akan membinasakan semangat akademik, dan menghalangi perkembangan perguruan tinggi, untuk turut menjadi sokoguru kemajuan bangsa. Sementara itu, dalam masyarakat berkembang pula salah pengertian yang menyamakan otonomi dengan "privatisasi", "komersialisasi" pendidikan. Bila menghendaki kemajuan bangsa dan ketahanan bangsa untuk menghadapi problem masa depan dalam bidang pangan, kesehatan, energi, lingkungan, sumber daya alam, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, maka otonomi perguruan tinggi harus didukung oleh Negara, dunia industry, dan masyarakat luas. Buku ini terdiri dari kumpulan tulisan berisi pemikiran yang bernas dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan pendidikan dan bangsa Indonesia, yang ditulis oleh para guru besar dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para ilmuwan menuliskan buah pemikirannya dalam rangka memperjuangkan otonomi perguruan tinggi. Mereka menguraikan berbagai permasalahan sekaligus pengalaman dan solusinya, dan bertujuan agar masyarakat ilmiah dan masyarakat luas yang ingin memahami seluk-beluk pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di Indonesia, dapat mempelajarinya.

Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca *How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?* Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharap agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawaban-

nya meskipun kemudian didapati bahwa membuat administrasi pajak lebih efektif tidak sesederhana mencerdaskan pebayar pajak. Pihak yang disebut terakhir memiliki tujuan yang spesifik: menuntaskan hak dan kewajiban pajak, atau kalau bisa meminimalkan beban pajak sepanjang dimungkinkan undang-undang. Pembinaan administrasi pajak, di sisi lain, tidak bisa hanya dilakukan pada sasaran individual dari perspektif mikro, melainkan harus mencakup keseluruhan sistem secara komprehensif. Tentu tidak ada niat memandang sebelah mata upaya-upaya pemberdayaan personel aparat pajak di level individual, namun pendekatan makro adalah suatu keniscayaan, bahwa administrasi pajak mesti dilihat secara utuh sebagai institusi, yang di dalamnya manusia adalah salah satu elemen penting. Individu yang baik dan kompeten tidak akan banyak berarti jika sistem dan institusi tidak kondusif. Lebih dari itu, buku ini menyadari bahwa tema utama reformasi administrasi pajak terlalu kompleks untuk dijawab dengan pendekatan *How to, O* sehingga pendekatan holistik dan komprehensif mutlak diperlukan. Jadilah buku seperti yang sekarang di tangan Anda dengan cakupan pembahasan sangat luas dalam skala perspektif ruang dan waktu.

Buku ini sangat diperuntukan semua kalangan, baik pengajar, mahasiswa, praktisi di Bisnis, pelayanan kesehatan, dsb. Agar organisasi tetap hidup dan mampu berkembang dalam era industri saat ini. Dengan penanganan yang baik, diharapkan terjadinya transformasi need and expectation SDM menjadi komitmen organisasi dan motivasi untuk menyelesaikan tugas sesuai tujuan organisasi. Perubahan positif terjadi bila internalisasi berbagai nilai, norma dan aturan informal menjadi budaya organisasi. Kebutuhan manusia adalah dorongan dan keinginan dasar manusia untuk bertahan hidup, sedangkan kemampuan manusia adalah kemampuan melakukan sesuatu atau potensinya untuk melakukan di masa depan.

Kumpulan artikel ini mencakup semua analisis tentang kesumberdayaan manusia. Secara garis besar, cakupan materi dalam buku ini meliputi pengaruh kompetensi kinerja karyawan, implementasi pengendalian, penilaian kerja, peran sumber daya manusia, pelatihan, pengaruh kepemimpinan, manajemen sumber daya, pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi, pengendalian, tantangan desain data center, strategi peningkatan SDM, serta pengaruh reward dan punishment.

Performance report of Indonesian State Minister of Administrative Reform.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil aka PNS, artinya kesejahteraan dan keamanan ada di genggaman. Hidup aman, terjamin, dan kamu adalah anak berbakti yang telah berhasil membanggakan orang tua. Jika surat pengangkatan sebagai PNS sudah di tangan, selamat! Karena status sosialmu naik tingkat dan kamu adalah calon menantu idaman. PNS memang profesi impian. Setidaknya untuk saat ini, ketika jutaan orang rela berebut lowongan di berbagai instansi pemerintahan di Indonesia. PNS adalah tujuan, obat paling mujarab untuk menjalani hidup dengan tenang. Benarkah? Christie, seorang pejabat kepegawaian di sebuah instansi pemerintah nan elite tengah galau luar biasa akibat rencana mutasi massal di unit kerjanya. Hatinya bimbang antara mematuhi keputusan pimpinan atau menuruti pembangkangan para pegawai yang menolak dimutasi.

Controversary of Indonesian history; collected articles.

This report looks at the capacity and capabilities of civil servants of OECD countries and suggests approaches for addressing skills gaps through recruitment, development and workforce management

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Tata Kelola Keuangan Negara ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari diktat ini

adalah untuk menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa yang sesuai dengan RPS dan untuk mendukung pencapaian CPL Prodi Akuntansi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga Buku Tata Kelola Keuangan Negara ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari, bahwa diktat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Buku ini.

"Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi Indonesia baik di masa kini dan masa mendatang. Apresiasi yang tinggi diberikan pada setiap usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena memang seharusnya Indonesia bisa sedikit demi sedikit lepas dari KKN dan akhirnya terbebas darinya. Buku ini bukan sekadar bunga rampai atau kumpulan tulisan mengenai korupsi, melainkan ulasan komprehensif dari para pakar dan pejuang antikorupsi tentang berbagai aspek korupsi di Indonesia, sebagai akumulasi pengetahuan dan pengalaman 30-an pakar dari berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara. Harapan para pakar, pejuang antikorupsi, dan kita semua adalah Indonesia yang bebas dari korupsi sehingga masyarakat luas bisa sejahtera karena terhindar dari dampak buruk KKN yang merusak tatanan perekonomian dan kesejahteraan yang berkeadilan."

Buku ini disusun sebagai salah satu wujud kontribusi penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap organisasi tidak mungkin bisa sukses tanpa keberadaan orang-orang di balik organisasi tersebut. Oleh sebab itu, manusia merupakan kunci kelangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi. Manusia, sebagai sumber daya di dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar terkoordinasi dengan baik dan bisa mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Apabila sumber daya manusia ini tidak dikelola dengan benar, maka kesuksesan organisasi dalam pencapaian rencana strategisnya akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa manajemen SDM merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu organisasi/ institusi/perusahaan, bahkan pada level Kementrian dan Pemerintah. Dalam buku ini, penulis merangkai pendapat dan teori dari berbagai pakar manajemen SDM, baik yang berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi. Penulis juga menambahkan pen-

gayaan materi dari pengalaman sebagai pengajar dan konsultan serta praktisi yang terjun secara nyata di dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkup perusahaan milik pemerintah, swasta, campuran maupun lembaga di lingkungan universitas. Penulis berharap buku ini mampu memberikan gambaran dasar mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan praktik-praktiknya dengan ringan dan lugas bagi para pembacanya. Di dalam buku ini juga dilengkapi dengan berbagai suplemen yang menambah pengetahuan para pembaca mengenai praktik-praktik manajemen SDM yang nyata di Indonesia. Harapannya, setelah membaca dan mempelajari buku ini pembaca tidak hanya mumpuni di dalam berteori saja tetapi juga memiliki gambaran mengenai bagaimana praktik manajemen SDM yang nyata. Buku ini dikelompokkan menjadi lima bagian mengikuti alur manajemen SDM. Tujuannya agar pembaca bisa mengikuti tata urutan proses pengelolaan SDM di dalam organisasi sehingga bisa membantu mempercepat proses pembelajarannya. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan bukan hanya oleh kalangan akademisi saja seperti dosen dan mahasiswa, tetapi juga bisa digunakan oleh semua pihak yang ingin mendalami topik manajemen SDM. Penulis menyadari buku ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sekalian guna meningkatkan kualitas dari buku ini sehingga sumbangsih dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diberikan pun dapat lebih optimal. Akhir kata, penulis berharap buku ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca yang berasal dari praktisi dalam me-manage SDM di lingkungannya masing-masing agar dapat memberikan value added bagi perusahaannya. Sedangkan bagi rekan-rekan pembaca yang berasal dari kalangan akademisi, konsultan, dan masyarakat semoga dapat menambah pengayaan pengetahuan khususnya di bidang SDM.

Mass media coverage on bureaucracy reform in Indonesia, 2010.

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan kenaikan tunjangan pada direktorat tertentu di Departemen Keuangan merupakan kebijakan khusus Menteri Keuangan. Setiap kementerian atau lembaga pemerintah bisa berbeda dalam menetapkan besaran tunjangan pegawainya.

Progress of regional development in Indonesia, 2004-2009.

Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan.